

DISCREPANCY MANAJEMEN LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Rahmawati Rahmawati^{1*}, Putri Inayah², Dyah Amelia Susanti³, Nor Khofifat Sholehah⁴, Titin Indah Pratiwi⁵, Bambang Diby Wiyono⁶

24011355010@mhs.unesa.ac.id, 24011355009@mhs.unesa.ac.id, 25011355004@mhs.unesa.ac.id,
25011355009@mhs.unesa.ac.id, titinindahpratiwi@unesa.ac.id, bambangwiyono@unesa.ac.id

Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Guidance and Counseling (BK) management in schools plays a strategic role in student development, yet its implementation often faces obstacles in meeting the Operational Implementation Guidelines (POP) standards. This study aims to identify the discrepancy between the ideal POP BK standards and the actual implementation of individual counseling management at SMA Negeri 4 Surabaya. This study employed an evaluative approach using the Discrepancy Evaluation Model (DEM) to assess Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (POAC) aspects. Data were collected via interviews, observations, and documentation to compare actual conditions with established standards. The results show that overall, individual counseling management complies with standards, but implementation is not yet comprehensive. Significant discrepancies were found in the counseling process, which lacked theoretical adherence, needs assessments limited to AKPD instruments, and outcome evaluation and follow-up restricted to monitoring without in-depth analysis. While service management is functional, strengthening counselors' professional competence and developing data-driven evaluation systems are necessary to optimize counseling effectiveness.

Keywords: *Management, Individual Counseling,, Discrepancy Evaluation Model, POP BK, Program Evaluation*

Abstrak

Manajemen Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah memiliki peran strategis dalam perkembangan siswa, namun pelaksanaannya sering kali belum optimal dan menghadapi hambatan dalam memenuhi standar Panduan Operasional Pelaksanaan (POP). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan (discrepancy) antara standar ideal dalam POP BK dengan realitas pelaksanaan manajemen konseling individu di SMA Negeri 4 Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dengan Discrepancy Evaluation Model (DEM) untuk menilai aspek planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk membandingkan kondisi aktual dengan standar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, manajemen konseling individu berada pada kategori sesuai standar, namun pelaksanaannya belum komprehensif. Kesenjangan signifikan ditemukan pada aspek proses konseling yang cenderung tidak mengikuti tahapan teoretis, asesmen kebutuhan yang terbatas pada instrumen AKPD, serta evaluasi hasil dan tindak lanjut yang hanya sebatas monitoring tanpa analisis mendalam. Meskipun manajemen

layanan telah berjalan, diperlukan penguatan kompetensi profesional guru BK dan pengembangan sistem evaluasi berbasis data untuk mengoptimalkan efektivitas layanan konseling.

Kata Kunci: Manajemen, Konseling Individu, *Discrepancy Evaluation Model*, POP BK, Evaluasi Program.

PENDAHULUAN

Manajemen pelaksanaan dalam Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah mempunyai peran strategis untuk mendukung perkembangan potensi siswa secara optimal (Desvikayati et al., 2025). Guru bimbingan dan konseling dituntut memiliki pemahaman yang luas serta kompetensi profesional dalam menguasai konsep dasar layanan BK di sekolah dan menerapkan manajemen layanan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengawasan. Untuk dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, guru BK perlu menyusun program bimbingan dan konseling secara terencana dan sistematis (Fauzi & Suherman, 2024; Gysbers & Henderson, 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru BK di SMA Negeri yang ada Surabaya, proses manajemen pelaksanaan program telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keterpaduan sebagaimana diatur dalam panduan operasional pelaksanaan (POP) BK. (Andianti et al., 2025) menemukan dalam penilaiannya pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SMP Kristen 2 Eben Haezer Salatiga masih belum mencapai standar ideal seperti ketidaksesuaian muncul pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi layanan. Lebih lanjut (R. Hakim et al., 2023) juga menemukan masih terdapat sejumlah sekolah menengah yang melaksanakan program Bimbingan dan Konseling tanpa berlandaskan pada komponen utama key programming. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara perencanaan berbasis kebutuhan dan pelaksanaan program yang bersifat instruktif dari pihak manajemen sekolah.

Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor menjelaskan bahwa seorang konselor sekolah bertugas untuk mampu menyelenggarakan manajemen bimbingan dan konseling yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi di bidang pendampingan dan konseling (Dasalinda & Chairunnisa, 2024). Untuk menghasilkan pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling yang baik, maka guru BK harus memperhatikan fungsi

manajemen (*Planning, Organizing, Actualizing, Controlling* atau POAC) dalam melihat keberhasilan layanan BK yang telah dan akan dilaksanakan. Menurut (Larasati et al., 2024) program pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah tidak mungkin akan tersusun, terselenggara hingga tercapai apabila tidak dikelola dengan baik oleh sistem manajemen yang bermutu. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai konselor, fasilitator di sekolah sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang berasal dari beragam faktor, sehingga banyak sekolah belum mampu mengimplementasikan layanan BK secara optimal (Harahap et al., 2025; Sapari & Firmansyah, 2024).

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan meliputi beberapa aspek utama, yakni program bimbingan dan konseling dibangun atas empat unsur pokok, yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individu, layanan responsif, serta dukungan sistem. Layanan ini mencakup bidang pribadi, sosial, belajar atau akademik, serta karir. Strategi pelaksanaannya dapat dilakukan secara kelompok, klasikal, lintas kelas ataupun individu (Zamroni and Rahardjo, 2015; Velyna 2025).

Layanan konseling individu dalam Panduan Operasional Pelaksanaan (POP) bimbingan dan konseling sekolah menengah menjelaskan jika konseling individual merupakan proses interaktif yang dicirikan oleh hubungan yang unik antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik/konseli yang mengarah pada perubahan perilaku, konstruksi pribadi, kemampuan mengatasi situasi hidup dan keterampilan membuat keputusan. Konseling individual diberikan baik kepada peserta didik/konseli yang datang sendiri maupun diundang. Peserta didik/konseli diundang oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor berdasarkan hasil asesmen, referral, dan observasi (POP BK SMA, 2016).

Sebagai pedoman, Model Panduan Operasional Pelaksanaan (POP) BK berfungsi menyediakan langkah-langkah sistematis dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Kehadiran model ini memudahkan guru BK dalam merancang dan melaksanakan berbagai layanan BK di sekolah (Nelissa et al., 2020). POP BK diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2016 dan direkomendasikan oleh ABKIN untuk digunakan mulai jenjang SD hingga SMA.

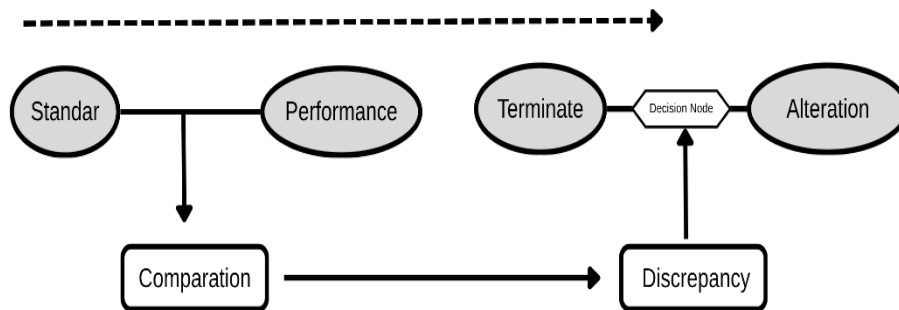
Dokumen ini menjadi acuan komprehensif bagi guru BK atau konselor dalam menjalankan program layanan secara terstruktur dan sesuai standar (Sinaga et al., 2022).

Menurut (Fauzi & Suherman, 2024; Charolina & Silubun, 2024) evaluasi adalah suatu kegiatan dari berbagai program dan kegiatan yang ada guna membuat penilaian ataupun keputusan. Dalam konteks penelitian evaluatif, pelaksanaan layanan konseling individu berdasarkan POP BK dianalisis menggunakan *Discrepancy Evaluation Model* (DEM). Model evaluasi ini berfokus pada identifikasi kesenjangan (*discrepancy*) antara standar yang seharusnya dalam hal ini pedoman POP BK dengan kondisi yang terjadi di lapangan. DEM memungkinkan evaluator yakni peneliti melihat secara rinci apakah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi layanan konseling individu telah selaras dengan ketentuan dalam pedoman. Dengan membandingkan standar ideal dan praktik nyata, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesenjangan antara manajemen pelaksanaan layanan konseling individu dengan standar manajemen konseling individu pada POP BK. Model ini sangat relevan digunakan untuk menilai kualitas manajemen pelaksanaan konseling individu di sekolah dan memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih terarah

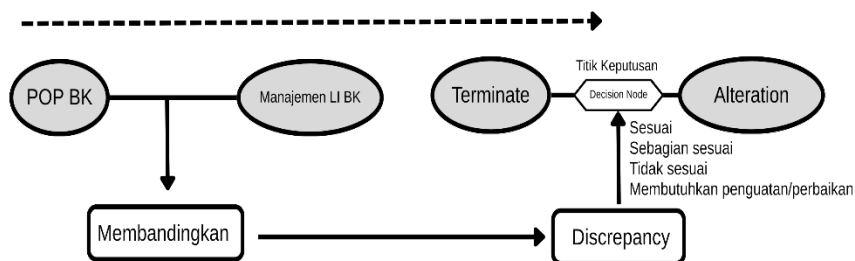
METODE

Penelitian ini menggunakan model evaluatif dengan tujuan mengidentifikasi kesesuaian (*conformity*) dan ketidaksesuaian (*discrepancy*) antara standar ideal dalam Panduan Operasional Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling (POP BK SMA, 2016) dan praktik nyata manajemen pelaksanaan konseling individu di sekolah. Model evaluasi yang digunakan adalah *Discrepancy Evaluation Model* (DEM) yaitu evaluasi dalam tradisi Tylerian yang dikembangkan oleh Malcolm Provus dimana pendekatannya pada tugas-tugas evaluasi di sekolah-sekolah umum. Provus melihat evaluasi sebagai proses manajemen informasi yang berkelanjutan yang dirancang sebagai pembantu administrasi dalam pengelolaan pengembangan program melalui pengambilan keputusan yang tepat (Fitzpatrick et al., 2011) serta melihat perbandingan antara apa yang ada sebagai pencapaian/kinerja (*performance*) dengan apa yang seharusnya (*standard*) (Ariani, 2021). Model ini memungkinkan peneliti membandingkan kondisi aktual dengan standar yang telah ditetapkan pada setiap tahap evaluasi, meliputi *definition/design, installation,*

process, product, dan Cost-benefit analysis (optional) (Wiyono et al., 2023; Fitzpatrick et al., 2011)



Bagan 1. Paradigma umum evaluasi model DEM (Provus, 1971) (Fitzpatrick et al., 2011)



Bagan 2. Alur Evaluasi Penelitian

Pelaksanaan konseling individu mengacu pada POP BK dengan realitas di lapangan, POP BK dianalisis menggunakan *Discrepancy Evaluation Model* (DEM) yang terdiri atas lima komponen utama. 1) *Definition/Design* menitikberatkan pada penetapan standar, yaitu mengacu pada Panduan Operasional Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling (POP BK) sebagai kriteria ideal. Pada tahap ini ditentukan aspek mengenai manajemen dalam BK yaitu *planning, organizing, actuating, controlling*, dalam layanan konseling individu yang seharusnya dilakukan guru BK. 2) *Installation* mengevaluasi

sejauh mana ketentuan POP BK telah diinstalasi atau diterapkan dalam konteks manajemen layanan konseling individu di sekolah, termasuk ketersediaan program, kesiapan guru BK, serta dukungan sarana pendukung seperti ruang konseling, instrumen asesmen, dan dokumen administratif. 3) *Process*, berfokus pada pelaksanaan layanan konseling individu di lapangan. Evaluasi dilakukan dengan melihat alur konseling, metode yang digunakan guru BK, mekanisme asesmen, teknik intervensi, alokasi waktu, serta kejelasan dokumentasi layanan. Pada tahap ini dilakukan perbandingan sistematis antara standar POP BK dan praktik yang berjalan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan (*discrepancy*), apakah layanan telah sesuai, sebagian sesuai, tidak sesuai, atau memerlukan penguatan. 4) *Product* mengevaluasi hasil layanan konseling individu, yaitu sejauh mana tujuan layanan tercapai, perubahan yang dialami konseli, serta tindak lanjut yang dilakukan guru BK setelah sesi berlangsung. Bagian ini juga menilai apakah layanan dapat dinyatakan terminate (tercapai) atau perlu dilakukan alteration berupa penyesuaian program maupun peningkatan kompetensi guru BK.

Terdapat pilihan tambahan yaitu *Cost-Benefit Analysis* yang digunakan untuk menilai keseimbangan antara sumber daya yang ada (waktu guru BK, dukungan sekolah, sarana, dan beban kerja) dengan manfaat yang diperoleh, baik bagi konseli maupun sekolah. Meskipun bersifat opsional, analisis ini berguna untuk memperkuat rekomendasi perbaikan layanan sehingga sekolah dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan konseling individu.

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Surabaya dengan Subjek penelitian yaitu guru BK sebagai informan utama atau wawancara, serta didukung oleh data dari observasi dan dokumen program BK untuk memperkuat analisis dan triangulasi data. Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek utama, yaitu perencanaan layanan, pengorganisasian sarana dan instrumen, pelaksanaan konseling individu, dan proses evaluasi atau tindak lanjut layanan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang disusun untuk menelusuri keselarasan maupun ketidaksesuaian antara ketentuan dalam POP BK mengenai POAC dan praktik nyata pelaksanaan konseling individu di sekolah yang dikelompokkan ke dalam kategori seperti sesuai, sebagian sesuai, terdapat kesenjangan, atau membutuhkan penguatan serta perbaikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengumpulan data dimulai dengan menyiapkan data wawancara, membaca keseluruhan transkrip, kemudian melakukan pengodean atau menentukan kategori setiap indikator untuk mengidentifikasi hasil wawancara. Proses ini menghasilkan temuan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Pedoman wawancara

No	Tahapan Manajemen	Indikator	Aspek	Kategori			
				Sesuai Standar	Sebagian Sesuai	Terdapat Kesenjangan	Perlu Penguatan
1	<i>Planning</i>	Tahap Persiapan (Planning) Perencanaan Program	Melakukan asesmen kebutuhan		✓		
2			Mendapatkan dukungan pimpinan dan komite sekolah	✓			
3			Menetapkan dasar perencanaan layanan	✓			
4	<i>Organizing</i>	Tahap Perancangan (Designing)	Penyusunan Program Tahunan BK	✓			
5			Penyusunan Program Semesteran BK	✓			
6			Ruang Lingkup		✓		
7	<i>Actuating</i>	Tahap Pelaksanaan Konseling Individu	Pra-konseling	✓			
8			Proses Konseling			✓	
9			Pasca Konseling	✓			
10	<i>Controlling</i>	Tahap Evaluasi	Evaluasi Proses		✓		
11			Evaluasi Hasil				✓
12			Pelaporan Tindak Lanjut	✓			
13							✓

Hasil analisis pada tabel 1 pedoman wawancara pelaksanaan manajemen konseling individu menurut standar POP BK pada sekolah menengah mencakup 4 indikator yang terdiri dari 13 aspek. Indikator pertama “Tahap Persiapan (*Planning*) Perencanaan Program” terdiri dari 3 aspek, yaitu: (1) melakukan asesmen kebutuhan; (2) mendapatkan dukungan pimpinan dan komite sekolah; dan (3) menetapkan dasar perencanaan layanan. Indikator kedua “Tahap Perancangan (*Designing*)” terdiri dari 3 aspek, yaitu (4) penyusunan program tahunan BK; (5) penyusunan program semesteran BK; dan (6) ruang lingkup. Indikator ketiga “Tahap Pelaksanaan Konseling Individu” terdiri dari 3 aspek, yakni: (7) pra-konseling; (8) proses konseling; dan (9) pasca konseling. Serta Indikator keempat “Tahap Evaluasi” terdiri dari 4 aspek, yaitu: (10) evaluasi proses; (11) evaluasi hasil; (12) pelaporan; dan (13) tindak lanjut. Berdasarkan hasil peluncuran instrumen tersebut, kemudian peneliti melakukan analisis dan interpretasi tentang bagaimana pelaksanaan manajemen konseling individu dijalankan di sekolah. Menurut hasil analisis data, dari 4 indikator tersebut, keseluruhan manajemen konseling individu menunjukkan kategori sesuai standar POP BK. Aspek 2, 3, 4, 5, 7, 9, dan 12 menunjukkan manajemen konseling individu yang sesuai standar POP BK. Kemudian, aspek 1, 6, dan 10 menunjukkan manajemen konseling individu yang sebagian sesuai standar POP BK dan aspek 8 menunjukkan manajemen konseling individu yang terdapat kesenjangan standar POP BK serta aspek 11 dan 13 menunjukkan manajemen konseling individu yang perlu penguatan sesuai standar POP BK (Tabel 1).

Aspek 1 mengenai melakukan asesmen kebutuhan menunjukkan bahwa manajemen konseling individu sebagian sesuai standar POP BK. Hal ini dapat dilihat dari manajemen konseling individu yang sebagian sesuai dalam: (a) mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program layanan; (b) memilih instrumen pengumpulan data sesuai kebutuhan; dan (c) mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. Aspek 2 mengenai mendapatkan dukungan pimpinan dan komite sekolah menunjukkan bahwa manajemen konseling individu sesuai standar POP BK. Hal ini dapat dilihat dari manajemen konseling individu yang sesuai standar dalam: (a) memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan komite sekolah; (b) melakukan konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi; dan (c) menghasilkan kebijakan yang mendukung, fasilitas untuk kegiatan, kolaborasi dan sinergitas kerja dalam upaya tercapainya

kemandirian dan perkembangan utuh yang optimal peserta didik/konseli. Aspek 3 mengenai menetapkan dasar perencanaan layanan menunjukkan bahwa manajemen konseling individu sesuai standar POP BK. Hal ini dapat dilihat dari manajemen konseling individu yang sesuai standar dalam: (a) layanan konseling individu didasarkan pada landasan filosofis, teoritis, dan hasil asesmen kebutuhan peserta didik/konseli. Aspek 4 mengenai penyusunan program tahunan BK menunjukkan bahwa manajemen konseling individu sesuai standar POP BK. Hal ini dapat dilihat dari manajemen konseling individu yang sesuai standar dalam: (a) Kesuaian struktur program tahunan bimbingan dan konseling terdiri atas: rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema/topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana prasarana, dan anggaran biaya. Aspek 5 mengenai penyusunan program semesteran BK menunjukkan bahwa manajemen konseling individu sesuai standar POP BK. Hal ini dapat dilihat dari manajemen konseling individu yang sesuai standar dalam: (a) program semester dikembangkan berbasis pada rencana operasional (action plan) yang telah disusun sebelumnya. Aspek 6 mengenai ruang lingkup menunjukkan bahwa manajemen konseling individu sebagian sesuai standar POP BK. Hal ini dapat dilihat dari manajemen konseling individu yang sebagian sesuai dalam: (a) layanan konseling individu didasarkan kepada tujuan, prinsip, fungsi dan azas bimbingan dan konseling; (b) layanan konseling individu mencakup media, kegiatan administrasi, serta kegiatan tambahan dan pengembangan keprofesian guru bimbingan dan konseling.

Aspek 7 mengenai pra-konseling menunjukkan bahwa manajemen konseling individu sesuai standar POP BK. Hal ini dapat dilihat dari manajemen konseling individu yang sesuai standar dalam: (a) mengumpulkan dan menganalisis data peserta didik/konseli secara komprehensif (potensi, masalah, latar belakang kondisi konseli). (konseli yang diundang); (b) menyusun RPL konseling. (konseli yang diundang); (c) penataan ruang; dan (d) kesiapan pribadi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Aspek 8 mengenai proses konseling menunjukkan bahwa manajemen konseling individu terdapat kesenjangan standar POP BK. Hal ini dapat dilihat dari manajemen konseling individu yang terdapat kesenjangan standar dalam: (a) membangun relasi konseling; (b) melaksanakan tahapan dan menggunakan teknik konseling sesuai teori yang dipilih baik secara tunggal, maupun integratif; dan (c) mengakhiri proses konseling. Aspek 9

mengenai pasca konseling menunjukkan bahwa manajemen konseling individu sesuai standar POP BK. Hal ini dapat dilihat dari manajemen konseling individu yang sesuai standar dalam: (a) membuat laporan konseling; dan (b) berdasarkan kesepakatan dengan peserta didik/konseli, guru bimbingan dan konseling atau konselor memonitoring dan mengevaluasi tindakan/perilaku yang direncanakan peserta didik/konseli. Aspek 10 mengenai evaluasi proses menunjukkan bahwa manajemen konseling individu sebagian sesuai standar POP BK. Hal ini dapat dilihat dari manajemen konseling individu yang sebagian sesuai dalam: (a) evaluasi proses dilakukan selama kegiatan layanan konseling individu berlangsung. Aspek 11 mengenai evaluasi hasil menunjukkan bahwa manajemen konseling individu perlu penguatan sesuai standar POP BK. Hal ini dapat dilihat dari manajemen konseling individu yang masih memerlukan penguatan dalam: (a) evaluasi hasil dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan konseling individu dilihat dari hasilnya. Aspek 12 mengenai pelaporan menunjukkan bahwa manajemen konseling individu sesuai standar POP BK. Hal ini dapat dilihat dari manajemen konseling individu yang sesuai standar dalam: (a) laporan dibuat menggambarkan detail keseluruhan layanan konseling individu yang telah dilakukan. Aspek 13 mengenai tindak lanjut menunjukkan bahwa manajemen konseling individu perlu penguatan sesuai standar POP BK. Hal ini dapat dilihat dari manajemen konseling individu yang masih memerlukan penguatan dalam: (a) tindak lanjut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan konseling individu; (b) guru BK/Konselor memikirkan ulang keseluruhan layanan konseling individu yang telah dilaksanakan dengan cara membuat desain ulang atau merevisi seluruh program atau beberapa bagian dari program yang dianggap belum begitu efektif

Tabel 2. Analisis *Discrepancy* Evaluasi Pelaksanaan Layanan Konseling Individu dengan Manajemen dalam POP BK

Manajemen dalam POP BK	Aspek	Deskriptor	Realita dilapangan
<i>Planning</i>	Melakukan asesmen kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program layanan 2. Memilih instrumen pengumpulan data sesuai kebutuhan 3. Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK telah menentukan data yang akan diukur/diungkap untuk kepentingan penyusunan program layanan konseling individu, seperti data tugas perkembangan, permasalahan dan prestasi

		dan Menginterpretasi Data Hasil Asesmen Kebutuhan	peserta didik setiap semester.
			2. Guru BK hanya menggunakan instrumen AKPD pada peserta didik karena dirasa AKPD lebih sederhana dan mencakup keseluruhan aspek layanan BK.
			3. Guru BK mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi hasil analisis AKPD sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
	Mendapatkan dukungan pimpinan dan komite sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan komite sekolah. 2. Melakukan konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi. 3. Menghasilkan kebijakan yang mendukung, fasilitas untuk kegiatan, kolaborasi dan sinergitas kerja dalam upaya tercapainya kemandirian dan perkembangan utuh yang optimal peserta didik/konseli. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap tahun ajaran baru, guru BK telah memperoleh dukungan dalam bentuk telah dilaksanakannya secara rutin rapat koordinasi bersama dengan berbagai pihak yakni, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru wali kelas, dan komite sekolah guna menghasilkan kebijakan yang mendukung, fasilitas untuk kegiatan, kolaborasi dan sinergitas kerja dalam upaya tercapainya kemandirian dan perkembangan utuh yang optimal bagi peserta didik/konseli.
	Menetapkan dasar perencanaan layanan	Layanan konseling individu didasarkan pada landasan filosofis, teoritis, dan hasil asesmen kebutuhan peserta didik/konseli.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK melaksanakan konseling individu sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan peserta didik. Baik dari hasil AKPD yang telah diisi oleh peserta didik ataupun dari hasil catatan keseharian konselor serta laporan dari pihak lain (guru/ teman sekelas).
<i>Organizing</i>	Penyusunan Program Tahunan BK	Kesuaian struktur program tahunan bimbingan dan konseling terdiri atas: a) rasional, b) dasar hukum, c) visi dan misi, d) deskripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK sudah menyusun program tahunan sesuai standar POP BK dan menyesuaikannya dengan kebutuhan peserta didik.

		kebutuhan, e) tujuan, f) komponen program, g) bidang layanan, h) rencana operasional, i) pengembangan tema/topik, j) rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, k) sarana prasarana, dan l) anggaran biaya.	Tidak hanya itu, setiap pergantian semester, guru BK selalu memperbarui program tersebut dengan penyebaran AKPD ulang.
	Penyusunan Program Semesteran BK	Program semester dikembangkan berbasis pada rencana operasional (<i>action plan</i>) yang telah disusun sebelumnya.	1. Pada program semesteran guru BK telah menyusun dengan menyesuaikan pada rencana operasional (<i>action plan</i>) program tahunan yang telah disusun sebelumnya.
	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan konseling individu didasarkan pada tujuan, prinsip, fungsi dan azas bimbingan dan konseling. 2. Layanan konseling individu mencakup media, kegiatan administrasi, serta kegiatan tambahan dan pengembangan keprofesian guru bimbingan dan konseling. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK telah melaksanakan layanan konseling individu sesuai dengan tujuan, prinsip, fungsi, dan tetap mempertahankan azas yang terdapat dalam BK. 2. Guru BK yang berkualifikasi S1 BK hanya terdiri dari 1 orang sedangkan 3 guru BK yang lain berkualifikasi S1 non-BK.
<i>Actuating</i>	Pra-konseling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan menganalisis data peserta didik/konseli secara komprehensif (potensi, masalah, latar belakang kondisi konseli). (konseli yang diundang) 2. Menyusun RPL konseling. (konseli yang diundang) 3. Penataan ruang 4. Kesiapan pribadi guru bimbingan dan konseling atau konselor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kasus peserta didik/konseli yang diundang, pengumpulan dan analisis data melalui AKPD dilakukan oleh guru BK secara komprehensif. 2. Setelah itu, guru BK melakukan penyusunan RPL konseling individu bagi peserta didik/konseli yang diundang. 3. Penataan ruang konseling individu dilaksanakan setiap hari oleh Guru BK. 4. Guru BK memiliki kesiapan dalam pelaksanaan layanan konseling individu.

Proses Konseling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun relasi konseling. 2. Melaksanakan tahapan dan menggunakan teknik konseling sesuai teori yang dipilih baik secara tunggal, maupun integratif. 3. Mengakhiri proses konseling. 	<p>Dalam proses pelaksanaan sesi konseling individu, ditemukan bahwa guru BK sering kali tidak berlandaskan pada teori, teknik, dan tahapan pada konseling individu. Guru BK terkadang merasa tahapan tersebut akan membuat kaku proses konseling individu. Sehingga Guru BK hanya melaksanakan tahapan proses konseling individu dengan disesuaikan keadaan konseli.</p>	
Pasca Konseling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan konseling. 2. Berdasarkan kesepakatan dengan peserta didik/konseli, guru bimbingan dan konseling atau konselor memonitoring dan mengevaluasi tindakan/perilaku yang direncanakan peserta didik/konseli. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK telah membuat laporan konseling individu yang kemudian diserahkan kepada kepala sekolah. 2. Guru BK juga melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan konseling individu dengan menanyakan perubahan perilaku peserta didik/konseli kepada perangkat kelas konseli seperti ketua kelas atau sekretaris kelas serta guru wali kelas atau guru mata pelajaran. 	
<i>Controlling</i>	Evaluasi Proses	Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan layanan konseling individu berlangsung.	<p>Pada evaluasi proses didapatkan bahwasannya peserta didik/konseli yang terlibat secara aktif dan memiliki antusiasme tinggi dalam layanan konseling individu biasanya peserta didik/konseli yang datang sendiri. Sedangkan peserta didik/konseli yang datang diundang cenderung lebih pasif. Selain itu, guru BK dalam pelaksanaan layanan konseling individu tidak sesuai dengan prosedur pemberian layanan yang berlaku dengan alokasi waktu pemberian layanan konseling individu mencapai 4-5 jam.</p>

Evaluasi Hasil	Evaluasi hasil dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan konseling individu dilihat dari hasilnya.	Evaluasi hasil dalam pelaksanaan konseling individu hanya dilakukan melalui <i>monitoring</i> .
Pelaporan	Laporan dibuat menggambarkan detail keseluruhan layanan konseling individu yang telah dilakukan.	Laporan dibuat oleh guru BK sesuai dengan sistematika dengan memperhatikan kaidah penulisan serta dilaporkan dengan tepat waktu.
Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan konseling individu. 2. Guru BK/Konselor memikirkan ulang keseluruhan layanan konseling individu yang telah dilaksanakan dengan cara membuat desain ulang atau merevisi seluruh program atau beberapa bagian dari program yang dianggap belum begitu efektif. 	Guru BK hanya melaksanakan tindak lanjut melalui monitoring sampai pelaporan kepada kepala sekolah saja. Tidak ada analisis ulang mengenai keefektifan keseluruhan layanan konseling individu.

Berdasarkan tabel 2 yang disajikan diatas, manajemen konseling individu menurut standar POP BK dilaksanakan melalui 4 tahapan, yaitu: (a) *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Pada *planning* (perencanaan), realita dilapangan ditemukan bahwasannya guru BK sebagian sesuai standar POP BK dalam aspek melakukan asesmen kebutuhan dengan hanya menggunakan intrumen AKPD pada peserta didik karena dirasa AKPD lebih sederhana dan mencakup keseluruhan aspek layanan BK. Sedangkan kesesuaian standar POP BK dalam aspek mendapatkan dukungan pimpinan dan komite sekolah dibuktikan di lapangan bahwasannya setiap tahun ajaran baru, guru BK telah memperoleh dukungan dalam bentuk telah dilaksanakannya secara rutin rapat koordinasi bersama dengan berbagai pihak yakni, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru wali kelas, dan komite sekolah guna menghasilkan kebijakan yang mendukung, fasilitas untuk kegiatan, kolaborasi dan sinergitas kerja dalam upaya tercapainya kemandirian dan perkembangan

utuh yang optimal bagi peserta didik/konseli. Tidak hanya itu, kesesuaian standar POP BK berlanjut dalam aspek menetapkan dasar perencanaan layanan dengan hasil di lapangan guru BK melaksanakan konseling individu sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan peserta didik. Baik dari hasil AKPD yang telah diisi oleh peserta didik ataupun dari hasil catatan keseharian konselor serta laporan dari pihak lain (guru/ teman sekelas).

Pada tahap *organizing* (pengorganisasian) dalam aspek penyusunan program tahunan BK ditemukan realita di lapangan, Guru BK sudah menyusun program tahunan sesuai standar POP BK dan menyesuainya dengan kebutuhan peserta didik. Tidak hanya itu, setiap pergantian semester, guru BK selalu memperbarui program tersebut dengan penyebaran AKPD ulang. Kemudian, kesesuaian standar POP BK dalam aspek penyusunan program semesteran BK dibuktikan dengan guru BK telah menyusun dengan menyesuaikan pada rencana operasional (*action plan*) program tahunan yang telah disusun sebelumnya. Disisi lain, aspek ruang lingkup menunjukkan sebagian sesuai standar POP BK dengan ditemukannya di lapangan guru BK yang berkualifikasi S1 BK hanya terdiri dari 1 orang sedangkan 3 guru BK yang lain berkualifikasi S1 non-BK.

Tahap *actuating* (pelaksanaan) dalam pelaksanaannya di lapangan ditemukan kesesuaian dengan standar POP BK dalam aspek pra-konseling yang meliputi kasus pada peserta didik/konseli yang diundang, pengumpulan dan analisis data melalui AKPD dilakukan oleh guru BK secara komprehensif. Setelah itu, guru BK melakukan penyusunan RPL konseling individu bagi peserta didik/konseli yang diundang. Kemudian, penataan ruang konseling individu dilaksanakan setiap hari oleh guru BK, sehingga guru BK memiliki kesiapan dalam pelaksanaan layanan konseling individu. Sedangkan pada aspek proses konseling terdapat kesenjangan dari standar POP BK, yakni dalam proses pelaksanaan sesi konseling individu, ditemukan bahwa guru BK sering kali tidak berlandaskan pada teori, teknik, dan tahapan pada konseling individu. Guru BK terkadang merasa tahapan tersebut akan membuat kaku proses konseling individu. Sehingga Guru BK hanya melaksanakan tahapan proses konseling individu dengan disesuaikan keadaan konseli. Pada aspek pasca konseling ditemukan kesesuaian dengan standar POP BK yang menunjukkan bahwa guru BK telah membuat laporan konseling individu yang kemudian diserahkan kepada kepala sekolah. Guru BK juga melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan konseling individu dengan

menanyakan perubahan perilaku peserta didik/konseli kepada perangkat kelas konseli seperti ketua kelas atau sekretaris kelas serta guru wali kelas atau guru mata pelajaran.

Tahap *controlling* (pengawasan) mencakup aspek evaluasi proses yang sebagian sesuai dengan standar POP BK dengan ditemukannya peserta didik/konseli yang terlibat secara aktif dan memiliki antusiasme tinggi dalam layanan konseling individu biasanya peserta didik/konseli yang datang sendiri. Sedangkan peserta didik/konseli yang datang diundang cenderung lebih pasif. Selain itu, guru BK dalam pelaksanaan layanan konseling individu tidak sesuai dengan prosedur pemberian layanan yang berlaku dengan alokasi waktu pemberian layanan konseling individu mencapai 4-5 jam. Pada aspek evaluasi hasil diperlukan penguatan yang sesuai dengan standar POP BK karena dalam realita pelaksanaan konseling individu hanya dilakukan melalui *monitoring*. Kesesuaian standar POP BK dalam aspek pelaporan ditunjukkan dengan adanya laporan yang dibuat oleh guru BK sesuai dengan sistematika dengan memperhatikan kaidah penulisan serta dilaporkan dengan tepat waktu. Pada aspek terakhir, yakni aspek tindak lanjut memerlukan penguatan sesuai dengan standar POP BK karena guru BK hanya melaksanakan tindak lanjut melalui monitoring sampai pelaporan kepada kepala sekolah saja. Tidak ada analisis ulang mengenai keefektifan keseluruhan layanan konseling individu. Secara keseluruhan, pelaksanaan manajemen konseling individu telah berjalan sesuai standar POP BK, meskipun masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan penguatan, terutama dalam evaluasi hasil dan tindak lanjut program

Pembahasan

Pelaksanaan manajemen konseling individu pada sekolah menengah atas secara umum telah menunjukkan kesesuaian dengan standar POP BK, namun analisis lebih lanjut mengungkap sejumlah kesenjangan yang masih menghambat optimalisasi layanan.

A. Pada tahap perencanaan (*planning*),

Kesenjangan utama tampak pada aspek asesmen kebutuhan. Guru BK hanya memanfaatkan instrumen AKPD sebagai dasar pengumpulan data sehingga asesmen yang dilakukan belum sepenuhnya komprehensif atau sesuai dengan tuntutan dalam standar POP BK. Melalui asesmen kebutuhan yang dilakukan secara menyeluruh, pendidik dapat menyusun berbagai program yang lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan peserta didik (Widati et al., 2020). Standar yang seharusnya yaitu guru BK memilih dan

mengombinasikan berbagai instrumen asesmen, menganalisis data secara mendalam, serta menginterpretasikan temuan untuk perencanaan layanan. Proses asesmen dalam (Cahyaningtyas & Suherman, 2025) jika kebutuhan dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Pertama, guru mengidentifikasi jenis data yang relevan untuk penyusunan program layanan, termasuk informasi mengenai permasalahan siswa, capaian belajar, serta tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Kedua, pemilihan instrumen asesmen dilakukan secara tepat, baik berupa instrumen berbasis permasalahan seperti Daftar Cek Masalah (DCM), Alat ukur masalah (AUM) instrumen berbasis Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD) seperti Inventori Tugas Perkembangan (ITP), maupun instrumen berbasis tujuan bidang layanan (pribadi, sosial, belajar, dan karier) seperti sosiometri, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan angket. Ketiga, data yang diperoleh dari asesmen dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menggambarkan kebutuhan peserta didik secara akurat.

B. Tahap Pengorganisasian *Organizing*

Kesenjangan muncul pada aspek ruang lingkup layanan. Meskipun perencanaan program tahunan dan semesteran sudah mengikuti standar POP BK, pelaksanaan ruang lingkup layanan hanya sebagian sesuai standar karena tidak semua guru BK di sekolah memiliki kualifikasi akademik S1 Bimbingan dan Konseling. Ketidakmerataan kompetensi profesional ini berdampak pada kualitas pelaksanaan layanan, terutama dalam aspek pemahaman teori konseling, prinsip etika, dan kemampuan teknis dalam mengoperasionalkan layanan konseling individu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa standar profesional belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga memengaruhi mutu keseluruhan manajemen konseling individu. Hal ini sesuai yang telah tercantum dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dan Permendiknas No. 27 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling harus dilakukan oleh tenaga pendidik profesional yaitu konselor atau guru BK yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai standar, serta menjunjung asas dan kode etik profesi dalam memberikan layanan kepada konseli.

C. Tahap pelaksanaan (*actuating*),

Kesenjangan yang paling terlihat terdapat pada aspek proses konseling. Temuan lapangan menunjukkan bahwa guru BK sering kali tidak mengikuti tahapan konseling secara sistematis dan cenderung menghindari penggunaan teori dan teknik tertentu karena

dianggap membuat proses menjadi kaku. Hal ini tidak sejalan dengan standar POP BK yang menuntut pelaksanaan konseling berlandaskan teori, teknik, dan tahap-tahap konseling yang jelas mulai dari membangun hubungan, mengeksplorasi masalah, intervensi, hingga menutup sesi. Ketidaksesuaian ini menyebabkan proses konseling berjalan intuitif dan situasional, sehingga efektivitas intervensi menjadi kurang terukur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, selaras yang diungkapkan oleh (Khatulistiwa et al., 2024) jika guru BK tidak menguasai berbagai pendekatan, strategi, dan teknik konseling, guru BK akan kesulitan memberikan penanganan masalah secara optimal. Akibatnya, layanan yang diberikan kepada siswa sebagai klien tidak akan mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Menurut (Nelisma et al., 2024) strategi layanan bimbingan dan konseling merupakan seperangkat langkah terstruktur yang disusun oleh guru atau konselor untuk memfasilitasi individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan pengembangan diri.

D. Tahap pengawasan (*controlling*)

Menunjukkan beberapa kesenjangan signifikan. Pada aspek evaluasi proses, pelaksanaan layanan hanya sebagian sesuai standar. Evaluasi yang dilakukan guru BK terbatas pada kegiatan selama sesi berlangsung, sementara standar POP BK mengharuskan evaluasi proses dilakukan secara sistematis untuk menilai keterlibatan konseli, efektivitas tahapan, dan kesesuaian prosedur layanan atau dilakukan selama proses layanan individu. Evaluasi dalam layanan konseling individu merupakan komponen krusial dalam keseluruhan program bimbingan dan konseling. Melalui proses evaluasi tersebut, tingkat pencapaian serta efektivitas pelaksanaan layanan konseling individual dapat diidentifikasi dan diukur dengan lebih jelas (L. Hakim, 2022; Widyatmoko & Purwanta, 2019). Selain itu, alokasi waktu yang digunakan dalam layanan konseling individu mencapai 4-5 jam, jauh lebih panjang dari standar yang berlaku, sehingga menunjukkan ketidaktepatan prosedural dalam pelaksanaan layanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme monitoring dan pengendalian prosedur belum berjalan sebagaimana mestinya. Jika di berdasarkan dengan standar POP BK Waktu yang dibutuhkan pada setiap sesi (jika dibutuhkan lebih dari satu sesi) antara 45 menit sampai 90 menit sesuai kesepakatan bersama, begitu pula jeda antar sesi tergantung pada kesempatan yang dimiliki para anggota (POP BK SMA, 2016).

Kesenjangan yang paling signifikan pada tahap pengawasan tampak pada aspek evaluasi hasil dan tindak lanjut. Evaluasi hasil hanya dilakukan melalui monitoring perilaku dengan meminta informasi dari ketua kelas, wali kelas, atau guru mata pelajaran, tanpa menggunakan instrumen evaluasi hasil yang terstandar. Hal ini menandakan bahwa guru BK belum mengukur secara objektif sejauh mana layanan konseling individu efektif dalam membantu perubahan perilaku konseli. Selain itu, aspek tindak lanjut juga memerlukan penguatan karena pelaksanaannya hanya sebatas monitoring dan pelaporan kepada kepala sekolah. Guru BK belum melakukan analisis ulang terhadap efektivitas layanan, belum menyusun revisi program, dan belum melakukan penguatan intervensi lanjutan sebagaimana tuntutan POP BK. Kesenjangan pada kedua aspek ini memperlihatkan belum adanya budaya evaluasi layanan berbasis data yang kuat di sekolah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan manajemen konseling individu berada pada kategori “sesuai standar POP BK namun kesesuaian tersebut belum dilaksanakan secara Komprehensif”. Hal ini ditandai oleh keberhasilan pada tahap perencanaan dan organisasi program, tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek kompetensi konselor, pelaksanaan proses konseling, serta evaluasi hasil dan tindak lanjut. Kesenjangan-kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas profesional guru BK, penguatan implementasi standar operasional layanan konseling individu, serta pengembangan sistem evaluasi berbasis data sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

SIMPULAN

Manajemen konseling individu di SMA pada dasarnya sudah sesuai standar POP BK, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan di masa depan, terutama melalui peningkatan kompetensi profesional guru BK agar mampu melaksanakan asesmen, proses konseling, dan evaluasi sesuai standar POP BK. Sekolah perlu mendorong penggunaan berbagai instrumen asesmen yang lebih komprehensif, penerapan tahapan konseling secara sistematis, serta pengembangan sistem evaluasi hasil yang terstandar dan berbasis data. Selain itu, budaya tindak lanjut yang lebih kuat perlu dibangun melalui analisis efektivitas layanan dan revisi program secara berkelanjutan. Dengan penguatan pada area-area

tersebut, manajemen konseling individu di sekolah diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi perkembangan peserta didik.

REFERENSI

- Andianti, Y. P., Dwikurnaningsih, Y., & Loekmono, J. T. L. (2025). Evaluasi Program Bimbingan Konseling Dengan Menggunakan Model Evaluasi Discrepancy Di Smp Kristen 2 Eben Haezer Salatiga. *Realita Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 10.
- Ariani, A. (2021). Discrepancy Evaluation Model (Dem) Untuk Mengevaluasi Program Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pahlawan*, 17(02), 22–33.
- Cahyaningtyas, K., & Suherman, U. (2025). Need-Assessment Sebagai Kunci Perencanaan Program Bk Komprehensif: Kajian Systematic Literature Review. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(3), 1657–1671. <https://doi.org/10.31316/G-Couns.V9i3.7412>
- Charolina, H., & Silubun, A. (2024). *Discrepancy Evaluation Model (Dem). September*. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.13808777>
- Dasalinda, D., & Chairunnisa, D. (2024). Penerapan Fungsi Manajemen Poac (Planning , Organizing , Actuating , And Controlling) Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah. *Ideguru : Jurnal Karya Ilmiah Guru P-Issn*, 9(1), 357–364. <https://doi.org/https://doi.org/10.51169/Ideguru.V9i1.840>
- Desvikayati, I., Asyraf, M., & Amat, C. (2025). Effective Strategies In The Management Of Guidance And Counseling Implementation In Schools. *Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies*, 3(3), 195–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.58355/Qwt.V3i3.104>
- Fauzi, I., & Suherman, U. (2024). The Role Of Guidance And Counseling Evaluation : A Literature Review Study. *Ideguru : Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(3), 1504–1510. <https://doi.org/https://doi.org/10.51169/Ideguru.V9i3.1111>
- Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2011). *Program Evaluation Alternative Approaches And Practical Guidelines* (Fourth Edi). Pearson.
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). Developing & Managing Your School Guidance Dan Counseling Program. In *Your School Guidance & Counseling Program* (Vol. 53, Issue 9).
- Hakim, L. (2022). Keefektifan Evaluasi Model Cipp Pada Layanan Konseling Individu Di Sma Negeri Kabupaten Tegal. *Jcose (Jurnal Bimbingan Dan Konseling)*, 5(1), 85–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/Jcose.V5i1.105>
- Hakim, R., Ahmad, R., & Syukur, Y. (2023). Hambatan Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Program Bk Di Sma. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 7703–7711.
- Harahap, J. S., Hayati, R., & Dasril, D. (2025). Manajemen Bimbingan Konseling Dalam Meningkatkan Penguasaan Keterampilan Layanan Konseling Guru Bk. *Conseils (Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam)*, 5(1), 109–127. <https://doi.org/10.55352/T2j74739>
- Khatulistiawani, S., Muzaiyana, I., Ardiah, N., & Nelisma, Y. (2024). *Konsep Dasar Strategi Layanan Bk Di Sekolah*. 4, 5602–5612. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i2.9866>

- Larasati, P. S., Neviyarni, Firman, & Muhammad Asyraf Che Amat. (2024). Pentingnya Evaluasi Manajemen Bk Dalam Meningkatkan Keefektifan Pelayanan Konseling. *Advice: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(2), 40–47. <https://doi.org/10.32585/Advice.V6i2.5995>
- Nelisma, Y., Ardiyani, D., Sabela, A., & Desy, M. (2024). Dasar Strategi Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 6319–6330. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i3.10300>
- Pop Bk Sma. (2016). *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Sekolah Menengah Atas | I*.
- Sapari, S., & Firmansyah, D. (2024). Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengatasi Siswa Mengalami Gangguan Emosional Di Smk Nu Mekanika. *Jieco: Journal Of Islamic Education Counseling*, 4(1), 42–52.
- Widati, T., Atmarno, S., & Akhyar, M. (2020). *An Analysis Of The Needs For Comprehensive Guidance And Counseling Services For Senior High School Students*. 462(Isgc 2019), 64–69.
- Widyatmoko, W., & Purwanta, E. (2019). Evaluasi Hasil Layanan Konseling Individual Di Sekolah Menengah Atas Yogyakarta. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling*, 4(3), 109–114. <https://doi.org/10.17977/Um001v4i32019p109>
- Wiyono, B. D., Nursalim, M., & Pratiwi, T. I. (2023). *Evaluation Of The Quality Of Counseling Services In Improving The Achievement Motivation Of Senior High School Students*. Atlantis Press Sarl. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-008-4>